

**PENERAPAN SANKSI PIDANA SEBAGAI UPAYA MENJAGA KELESTARIAN  
KAWASAN GUNUNG PAPANDAYAN, KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA  
BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI**

**ABSTRAK**

**Jonas Valentin P  
110110110330**

Kelestarian lingkungan merupakan salah satu faktor penting dalam hidup manusia dan harus dijaga sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Kawasan Gunung Papandayan merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus dijaga kelestariannya demi kepentingan hidup masyarakat Indonesia. UU Konservasi hadir sebagai dasar hukum untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi di Indonesia. Namun permasalahan timbul ketika UU Konservasi tidak diimplementasikan dengan baik sehingga akan mengganggu kelestarian dari kawasan konservasi tersebut. Dalam tinjauan ini akan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi pidana dalam UU Konservasi yang merupakan dasar hukum untuk mengelola kawasan konservasi.

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data-data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Spesifikasi penulisan ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan, menelaah dan menganalisis secara sistematis, secara faktual serta secara akurat dari objek penulisan itu sendiri. Tahap penulisan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data penelitian ini normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa menurut UU Konservasi, pengrusakan kawasan konservasi dapat dikenakan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak melakukannya lagi. Namun dalam penerapannya BKSDA selaku pihak berwenang seringkali menyelesaikan masalah pengrusakan kawasan konservasi dengan cara mediasi sehingga kurang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kurangnya implementasi UU Konservasi oleh BKSDA Garut disebabkan oleh kendala-kendala dari tidak terpenuhinya faktor penegak hukum dari Soerjono Soekanto yang merupakan faktor paling penting dalam penerapan hukum. Dari hasil analisa diperoleh kesimpulan bahwa upaya represif merupakan salah satu solusi yang bisa diterapkan oleh BKSDA Garut dalam menjaga kawasan konservasi Gunung Papandayan, setelah upaya preventif dinilai tidak berhasil sama sekali. Sanksi pidana seharusnya bisa hadir sebagai sanksi pamungkas (*ultimum remidium*) untuk menjaga kawasan konservasi di Indonesia.

**APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AS AN EFFORT TO PRESERVE  
MOUNT PAPANDAYAN REGION, GARUT DISTRICT, WEST JAVA PROVINCE  
ASSOCIATED WITH LAW NO. 5 OF 1990 ON THE CONSERVATION OF  
NATURAL RESOURCES AND ITS ECOSYSTEM**

**ABSTRACT**

**Jonas Valentin P**

**110110110330**

Environmental sustainability is one of the important factors in human life and must be preserved as mandated by the legislation. Mount Papandayan is one of the conservation areas should be preserved for the interest of life in Indonesia. Conservation Act was present as the legal basis for preserving the conservation area in Indonesia, but the problem arises when the Conservation Act is not implemented properly so that it will interfere the preservation of the conservation area. In this review will analyze the constraints encountered in the application of criminal sanctions in Conservation Act which is the legal basis for managing the conservation area.

This writing method normative juridical approach by examining secondary data, primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials and primary data obtained through interviews. Specifications of this writing is descriptive is describing, analyzing and analyze systematically, factually and accurately on the object of writing itself. Writing stage through library research and field study. The data analysis method is normative qualitative research.

Based on the analysis we concluded that according to Conservation Act , the destruction of protected areas could be subject to criminal sanctions for deterrent for perpetrators so do not do it again. But in its application BKSDA as the authorities often solve the problem of destruction of conservation by mediation so it is less a deterrent effect on perpetrators. Lack of implementation of the Conservation Law by BKSDA Garut due to the constraints of non-fulfillment of the law enforcement apparatus Soerjono Soekanto which is the most important factor in the application of the law . From the analysis, it is concluded that the repressive efforts is one solution that can be implemented by BKSDA Garut in maintaining the conservation area of the volcano, after the preventive rated not succeed at all . Criminal sanctions should be present as the ultimate sanction (*ultimum remedium*) to maintain conservation areas in Indonesia .